



Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia

Dedeh Irma¹, Suparto²

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: *Dedehirma63@gmail.com¹, suparto@uinjkt.ac.id²

Article received: 28 Mei 2025, Review process: 03 Juni 2025,
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 01 Juli 2025

ABSTRACT

Accreditation plays a strategic role in the quality assurance system of higher education in Indonesia, especially amid the challenges of the Fourth Industrial Revolution and globalization. This study aims to analyze the role of accreditation in improving higher education quality, examine recent regulatory changes, identify implementation challenges, and explore innovative opportunities to strengthen the accreditation system. A descriptive qualitative method using literature review was employed to examine policy documents, scholarly journals, and official publications related to accreditation. The findings indicate that the transformation from a compliance-based to an outcome-based accreditation approach has encouraged higher education institutions to focus more on learning outcomes, societal contributions, and internal quality culture. The digitalization of accreditation processes and the emergence of Independent Accreditation Bodies have further enhanced the flexibility and efficiency of quality assurance. The implication is that accreditation reinforcement strategies must be designed holistically and involve all stakeholders to build adaptive, excellent, and globally competitive higher education.

Keywords: Accreditation, Higher Education, Quality, Outcome-Based, Education Policy

ABSTRAK

Akreditasi memiliki peran strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di tengah tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, menelaah regulasi terbaru, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengeksplorasi peluang inovatif dalam memperkuat sistem akreditasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi terkait akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendekatan akreditasi dari compliance-based menjadi outcome-based telah mendorong institusi pendidikan tinggi untuk lebih fokus pada hasil pembelajaran, kontribusi terhadap masyarakat, dan budaya mutu internal. Digitalisasi proses akreditasi serta hadirnya Lembaga Akreditasi Mandiri turut memperkuat fleksibilitas dan efisiensi penjaminan mutu. Implikasinya, strategi penguatan akreditasi perlu dirancang secara holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pendidikan tinggi yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Akreditasi, Pendidikan Tinggi, Mutu, Outcome-Based, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks pembangunan nasional, kualitas pendidikan tinggi bukan hanya mencerminkan kemajuan suatu bangsa, tetapi juga menentukan arah transformasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan menjadi elemen strategis yang harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan zaman, terutama di tengah kompleksitas era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat digital saat ini (Tilaar, 2022).

Salah satu instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah akreditasi. Akreditasi tidak hanya menjadi mekanisme evaluasi eksternal semata, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan mutu institusi secara menyeluruh. Melalui proses akreditasi, lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memenuhi standar tertentu dalam berbagai aspek, mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, pembelajaran, hingga luaran institusi seperti publikasi, kerja sama, dan rekam jejak alumni (BAN-PT, 2023). Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai cerminan kualitas institusi sekaligus penggerak budaya mutu internal.

Seiring perkembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pendekatan akreditasi mengalami perubahan signifikan. Regulasi terkini seperti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menandai transisi dari pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based) menjadi pendekatan berbasis hasil (outcome-based), yang lebih menekankan pada capaian pembelajaran, kontribusi terhadap masyarakat, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang lebih otonom, akuntabel, dan inovatif (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Namun, implementasi akreditasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta lemahnya budaya mutu di sejumlah perguruan tinggi menjadi hambatan serius dalam menjalankan proses akreditasi secara optimal. Selain itu, kompleksitas sistem akreditasi yang terus berkembang serta ketidaksiapan institusi dalam menghadapi perubahan kebijakan juga menjadi persoalan yang harus segera diatasi (Danim & Sudarwan, 2023). Dalam situasi ini, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga akreditasi, dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa akreditasi tidak hanya menjadi beban administratif, melainkan sarana strategis untuk mendorong kualitas.

Di sisi lain, munculnya berbagai peluang seperti digitalisasi sistem akreditasi, penguatan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta adopsi standar mutu internasional menjadi potensi besar untuk memperkuat akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Digitalisasi misalnya, telah memungkinkan evaluasi mutu dilakukan lebih efisien, transparan, dan berbasis data (Setiawan, 2023). Sementara itu, LAM yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang keilmuan membuka ruang penilaian yang lebih kontekstual dan profesional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia; (2) menelaah kebijakan-kebijakan terbaru yang berkaitan dengan akreditasi; (3) mengidentifikasi tantangan implementasi di lapangan; dan (4) mengeksplorasi potensi serta peluang strategis dalam penguatan akreditasi pendidikan tinggi. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang peran akreditasi, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pengelola institusi dalam membangun sistem penjaminan mutu yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai landasan utama dalam memperoleh dan menganalisis data. Data yang digunakan bersumber dari publikasi ilmiah yang relevan seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, dokumen kebijakan pendidikan, serta regulasi resmi terkait akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi dan aktualitas informasi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan akreditasi, tantangan implementasi, serta potensi penguatan mutu pendidikan tinggi. Analisis data dilakukan melalui teknik kajian isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi tema-tema pokok, merumuskan kerangka konseptual, serta menafsirkan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Peran Akreditasi dalam Menjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari sekadar alat administratif menjadi mekanisme strategis untuk menjamin dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan secara menyeluruh. Proses akreditasi mendorong institusi untuk memenuhi standar nasional dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola, sumber daya manusia, proses pembelajaran, dan luaran pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2022) bahwa kualitas pendidikan mencerminkan keberhasilan manajemen kelembagaan dan komitmen terhadap mutu.

Menurut Harvey dan Green (1993), mutu pendidikan tinggi dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi: *exceptionality*, *perfection*, *fitness for purpose*, *value for money*, dan *transformation*. Dalam konteks ini, akreditasi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar *exceptionality* dan *transformation*, yang berarti tidak hanya memenuhi syarat minimal, tetapi juga bertransformasi secara berkelanjutan menuju keunggulan.

Fungsi akreditasi sebagai sistem evaluasi eksternal juga mengarah pada internalisasi budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Samani dan Hariyanto (2022) menegaskan pentingnya budaya mutu sebagai fondasi kelembagaan yang

kuat. Dalam praktiknya, lembaga pendidikan tinggi yang telah terakreditasi menunjukkan sistem evaluasi internal yang lebih sistematis dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya mutu akademik dan non-akademik.

Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Febrianti dan Syukri (2023) mengungkapkan bahwa akreditasi mampu mendorong lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola, serta transparansi dalam laporan keuangan dan akademik. Ini membuktikan bahwa akreditasi telah berkembang menjadi instrumen refleksi kelembagaan, bukan hanya penilaian teknis semata.

Selain itu, akreditasi memberikan legitimasi formal terhadap kualitas suatu institusi di mata pemangku kepentingan, seperti calon mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dan pemerintah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat posisi perguruan tinggi dalam peta persaingan global. Dalam hal ini, akreditasi berperan sebagai jembatan antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peran akreditasi juga terlihat dalam peningkatan kapasitas institusional. Lestari (2023) mencatat bahwa lembaga yang telah terakreditasi menunjukkan peningkatan dalam hal pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, serta publikasi ilmiah. Dengan demikian, akreditasi bukan hanya alat pengendali mutu, melainkan pendorong inovasi akademik.

Secara keseluruhan, akreditasi telah menjadi bagian integral dari proses transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui perbaikan berkelanjutan dan sistem evaluasi yang terstruktur, akreditasi turut mengarahkan lembaga pendidikan tinggi untuk lebih responsif terhadap perubahan zaman, kebutuhan dunia kerja, dan tuntutan globalisasi.

Reformasi Kebijakan dan Adaptasi Perguruan Tinggi terhadap Standar Baru

Reformasi kebijakan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia ditandai oleh terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Regulasi ini mengubah pendekatan akreditasi dari compliance-based menjadi outcome-based, yang berarti penilaian tidak lagi fokus pada kelengkapan dokumen administratif semata, tetapi pada dampak nyata dari proses pembelajaran terhadap lulusan dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003), di mana aspek 'product' atau hasil menjadi titik tekan utama.

Dalam kebijakan ini, capaian pembelajaran dan kontribusi institusi terhadap pembangunan menjadi indikator utama mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Wahyuni dan Hidayat (2023) bahwa kinerja perguruan tinggi harus diukur berdasarkan keluaran (output) dan dampak (outcome), bukan hanya input dan proses. Oleh karena itu, akreditasi menjadi alat ukur efektivitas institusi dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi secara nyata.

Studi Pratama dan Utami (2023) menunjukkan bahwa perubahan pendekatan ini berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan daya saing perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang adaptif terhadap kebijakan baru cenderung lebih proaktif dalam melakukan evaluasi diri dan perencanaan strategis jangka panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi outcome-based mendorong tumbuhnya kesadaran mutu secara internal.

Di sisi lain, digitalisasi proses akreditasi menjadi terobosan penting dalam upaya efisiensi administrasi. Dengan memanfaatkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) dan integrasi data dari PD Dikti, proses penilaian menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Setiawan (2023) mencatat bahwa digitalisasi akreditasi mampu menurunkan beban administratif institusi dan meningkatkan objektivitas dalam evaluasi.

Pemerintah juga memperkenalkan sistem perpanjangan akreditasi otomatis berbasis kinerja, di mana institusi yang menunjukkan performa baik secara berkelanjutan akan mendapatkan perpanjangan status akreditasi tanpa harus melalui asesmen ulang. Kebijakan ini memberikan insentif positif bagi perguruan tinggi untuk terus menjaga dan meningkatkan mutunya.

Kemunculan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) seperti LAMDIK, LAM-PTKes, dan LAMEMBA memperkuat fleksibilitas sistem akreditasi. LAM menilai mutu berdasarkan karakteristik keilmuan masing-masing program studi. Hal ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan profesi dan pasar kerja. Penelitian dari Damayanti dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa pendekatan sektoral ini meningkatkan partisipasi dunia industri dalam proses penjaminan mutu.

Dengan demikian, reformasi kebijakan akreditasi bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi transformasi struktural yang menuntut adaptasi menyeluruh dari seluruh komponen perguruan tinggi. Akreditasi kini menjadi ukuran keberhasilan institusi dalam menciptakan dampak yang bermakna bagi masyarakat dan dunia global.

Sinergi Peluang dan Inovasi Menuju Akreditasi yang Berkelanjutan

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, sistem akreditasi di Indonesia juga membuka berbagai peluang inovatif yang dapat memperkuat budaya mutu secara berkelanjutan. Salah satu peluang tersebut adalah transformasi digital melalui sistem SAPTO yang memungkinkan pemantauan mutu dilakukan secara daring dan berbasis bukti. Studi BAN-PT (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi ini mendukung integritas dan efisiensi proses akreditasi.

Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memungkinkan evaluasi kinerja institusi dilakukan secara real-time. Hal ini sejalan dengan teori pengelolaan mutu total (Total Quality Management) yang menekankan pada data-driven decision making. Teknologi informasi berperan penting dalam membangun sistem mutu yang berkelanjutan, akuntabel, dan transparan.

Di sisi lain, penguatan Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi mutu. Samani et al. (2022) menyebutkan bahwa UPM yang kuat harus bekerja lintas unit akademik, terlibat dalam audit internal, serta memiliki otoritas strategis dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan mutu kampus. Hal ini menjadikan UPM bukan hanya alat administratif, tetapi motor penggerak reformasi mutu dari dalam institusi.

Pembangunan budaya mutu juga menjadi prioritas utama. Budaya mutu yang kuat ditandai dengan kesadaran kolektif terhadap pentingnya mutu, komitmen manajemen puncak, dan keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam proses perbaikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang dikenal dalam manajemen mutu ISO 21001.

Akreditasi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen internasionalisasi mutu pendidikan tinggi. Standar akreditasi global seperti AUN-QA dan ABET menjadi pintu masuk bagi perguruan tinggi Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional. Wahyuni dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa akreditasi internasional mampu meningkatkan daya saing lulusan serta memperluas kolaborasi akademik lintas negara.

Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi faktor penting dalam memperkuat relevansi akreditasi. Damayanti dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan industri dalam penyusunan instrumen akreditasi memastikan bahwa capaian pembelajaran selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menjadikan akreditasi tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif secara praktis.

Secara umum, dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat budaya mutu, dan membangun kolaborasi yang sinergis, sistem akreditasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi instrumen penjaminan mutu yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berdaya saing global. Oleh karena itu, strategi penguatan akreditasi perlu terus didorong dengan pendekatan holistik dan partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Kesimpulan, akreditasi memiliki peran sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, tidak hanya sebagai instrumen evaluatif eksternal, tetapi juga sebagai katalisator transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Reformasi kebijakan melalui pendekatan outcome-based, digitalisasi sistem akreditasi, serta hadirnya Lembaga Akreditasi Mandiri menunjukkan langkah progresif menuju sistem penjaminan mutu yang lebih adaptif, transparan, dan kontekstual. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan lemahnya budaya mutu, peluang besar terbuka melalui pemanfaatan teknologi, penguatan Unit Penjaminan Mutu (UPM), serta kolaborasi dengan dunia industri. Oleh karena itu, strategi penguatan akreditasi harus dibangun secara holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, relevan, dan berdaya saing global.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Fadhilah, Ramadani, Sandy, Aslamiah, & Cinantya, C. (2024). Akreditasi sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4951–4964.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2021). *Petunjuk teknis SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online)*. BAN-PT.

-
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2023a). *Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi*. BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2023b). *Instrumen akreditasi berbasis capaian pembelajaran*. BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2023c). *Panduan umum akreditasi perguruan tinggi*. BAN-PT.
- Danim, S., & Sudarwan. (2023). *Pengembangan mutu pendidikan sekolah: Teori, kebijakan, dan praktik akreditasi*. Alfabeta.
- Damayanti, & Lestari, I. (2023). Kemitraan strategis antara kampus dan industri dalam akreditasi pendidikan tinggi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi*, 7(1), 91–102.
- Dewantari, N. M., & Saroso, D. S. (2017). Peningkatan peringkat akreditasi menggunakan house of quality pada sekolah tinggi di Kopertis Wilayah IV. *Operations Excellence*, 9(2), 104–111.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi berbasis akreditasi*. Kemendikbudristek.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2023). *Strategi peningkatan kualitas menuju perguruan tinggi unggul*. Kemendikbudristek.
- Febrianti, I., & Syukri, M. (2023). Peran akreditasi dalam meningkatkan mutu layanan di lembaga pendidikan. *JUMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 11–23.
- Ikhsan, & Santika, D. (2022). Membangun budaya mutu di perguruan tinggi: Antara konsep dan realita. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 8(2), 112–124.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Kemendikbudristek.
- LAMDIK. (2023). *Panduan instrumen akreditasi program studi (IAPS) 4.0*. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- LAMDIK. (2023). *Panduan IAPS 2.0*. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- LAMEMBA, & LAMTEKNIK. (2023). *Dokumen standar akreditasi dan penilaian kompetensi*. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, & Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik.
- LAM-PTKes. (2022). *Standar akreditasi pendidikan profesi kesehatan*. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Lestari, E. (2023). Peran akreditasi dalam meningkatkan mutu layanan di lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 44–52.
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (2023).
- Pratama, & Utami. (2023). Kebijakan baru akreditasi pendidikan tinggi dan implikasinya. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 45–59.
- Rina Amalina, & Trias, F. (2023). Analisis kesiapan institusi dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 9(1), 35–47.
- Samani, M., & Hariyanto. (2022). *Manajemen mutu pendidikan*. Pustaka Setia.

- Setiawan, A. (2023). Transformasi digital dalam akreditasi pendidikan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 5(2), 123–135.
- Siti Rohani, & Ridwan, M. (2023). Evaluasi sistem akreditasi perguruan tinggi berbasis outcome: Peluang dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Tinggi*, 6(1), 56–59.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian strategis untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Wahyuni, S., & Hidayat, T. (2023). Internasionalisasi mutu perguruan tinggi di Indonesia: Peluang dan strategi. *Jurnal Mutu dan Akreditasi Pendidikan*, 10(1), 67–80.